

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Sejak sebelum Perang Dunia I Jerman merupakan sebuah negara yang memiliki andil besar terhadap sejarah politik internasional. Keterlibatannya dalam politik dunia membawa pengaruh yang sangat besar seperti lahirnya organisasi internasional seperti Liga Bangsa Bangsa hingga kemudian menjadi Perserikatan Bangsa Bangsa bahkan berdirinya Uni Eropa. Semua tak lepas dari keterlibatan aktif dari Jerman sendiri.

Sejak negara ini tergabung dalam sebuah organisasi dunia Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 1973, Jerman memiliki andil yang cukup besar terhadap organisasi ini. Antara lain sebagai negara donatur terbesar ketiga setelah Amerika dan Jepang di Perserikatan Bangsa Bangsa. Juga keterlibatannya dalam menegakkan keamanan dan perdamaian dunia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan sebanyak empat kali dalam berbagai konflik internasional, seperti kasus serangan Amerika atas Irak baru-baru ini. Menjadikan Jerman sebagai salah satu negara penting dalam organisasi internasional ini.

Dalam perkembangannya akhir-akhir ini Jerman dihadapkan pada sebuah peluang yang sangat baik. Yaitu menguatnya isu reformasi Perserikatan Bangsa Bangsa terutama perluasan dari keanggotaan anggota tetap Dewan Keamanan pasca serangan Amerika ke Irak Maret 2003 lalu. Kesempatan ini digunakan oleh Jerman untuk mengajukan proposal untuk mencalonkan diri untuk sebuah posisi di Dewan Keamanan tersebut.

Dari berbagai fakta-fakta yang terpaparkan inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menyelami lebih jauh permasalahan ini. Untuk itu penulis coba untuk mengangkat “Keinginan Jerman Untuk Menjadi Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa” sebagai judul skripsi.

B. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan ini penulis bertujuan untuk lebih mengetahui lebih jauh mengenai kancah Jerman di dunia Internasional, dan keinginan Jerman untuk menjadi anggota permanen Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa. Seiring dengan semakin menguatnya isu reformasi Perserikatan Bangsa Bangsa, terutama mengenai perluasan anggota Dewan Keamanannya.

Penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan program S1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga dapat dijadikan bahan bacaan bagi mereka yang ingin mengetahui mengapa Jerman menginginkan menjadi anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa.

C. Latar Belakang Masalah

Jerman merupakan negara besar di dunia, memainkan peran yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan politik internasional.

Yogyakarta, 11 Desember 2014. Penulis, Danis J. membuat terbitannya Liga Bangsa

Bangsa pada tahun 1919. Walaupun kemudian organisasi internasional ini akhirnya bubar karena kegagalannya dalam mengatasi berbagai konflik antara negara-negara di dunia. Bubarnya organisasi ini disebabkan oleh beberapa negara-negara kuat (Amerika, Jerman, Rusia) pada saat itu tidak mendukung organisasi ini. Dan kemudian melahirkan organisasi internasional lainnya yaitu Perserikatan Bangsa Bangsa. Yang terbentuk akibat dari Perang Dunia II yang dipicu oleh Jerman di Eropa pada 1 September 1933.

Setelah mengalami kekalahan pada tahun 1945, Jerman terbagi atas dua yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Dengan dibangun tembok Berlin yang memisahkan antara kedua Jerman tersebut pada 1961. Setelah terjadinya reunifikasi pada tahun 1990, Jerman kembali menjadi salah satu kekuatan dunia. Sebagai salah satu negara yang potensial di Eropa bahkan dunia. Di Uni Eropa Jerman merupakan negara pelopor bersama dengan Perancis. Bahkan boleh dikatakan sebagai nyawa bagi perkembangan perjalanan roda politik Uni Eropa. Sedangkan di Perserikatan Bangsa Bangsa Jerman telah lima kali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dan terakhir terpilih pada tanggal 1 Januari 2003 sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.¹

Seiring perjalanan politik luar negeri Jerman di PBB, Jerman dihadapkan pada sebuah peluang yang sangat baik. Yaitu dengan munculnya isu reformasi badan dunia ini. Isu yang berisi mengenai penguatan kembali PBB dengan penambahan jumlah anggota Dewan Keamanannya. Sejak terbentuknya organisasi ini pada tahun 1945 sampai sekarang jumlah anggota yang bergabung

¹Germany votes for Security Council <http://www.germany-info.org/UN/archive/press/2002>

menunjukkan angka yang meningkat pesat. Karena dengan perkembangan jumlah anggota yang semakin membesar banyak kalangan menilai bahwa PBB harus direformasi.

Reformasi yang dilakukan terutama pada keanggotaan Dewan Keamanan PBB. Dengan lima anggota tetap yang dimiliki oleh DK PBB dirasakan sangat kurang memadai dikaitkan dengan perkembangan politik internasional dewasa ini. Apalagi dikaitkan dengan hak veto yang dimiliki oleh kelima anggota tersebut dinilai sebagai sesuatu yang kurang demokratis. Hal lain yang membuat tidak demokratis yaitu ekstra kuatnya posisi kelima anggota tersebut. Pada dasarnya banyak negara-negara anggota PBB menginginkan restrukturisasi badan ini sehingga sesuai dengan realita dunia yang kian kompleks pada abad 21 ini. Mayoritas anggota Majelis Umum (MU-PBB) kian hari kian merasa bahwa Dewan Keamanan telah disalah gunakan oleh adidaya barat hanya untuk kepentingan dan keuntungan pihak dan sekutunya semata.²

Semangat terhadap tuntutan reformasi-restrukturisasi PBB yang mulai terdengar sejak tahun 1988 pada debat dalam tubuh Majelis Umum, dan mulai menguat setelah serangan AS dan Inggris ke Irak. Invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke Irak Maret 2003 lalu menimbulkan catatan buruk terhadap perdamaian dunia. Amerika bersama sekutu Eropanya terutama Inggris sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa melakukan invasi tersebut dengan alasan Irak sebagai sarang teroris dan menyimpan senjata pemusnah massal serta penolakan terhadap pelucutan senjata tersebut. Invasi

² *Wanada*, "Penting Perubahan Lembaga DK PBB" 15 September 2004

tersebut dilakukan Amerika sebagai bukti terhadap tindakannya dalam memerangi terorisme internasional serta peran sertanya sebagai polisi dunia.

Meskipun tindakan invasi itu kemudian banyak ditentang oleh negara-negara anggota PBB dan dianggap ilegal karena tidak mendapat persetujuan penuh dari Dewan Keamanan PBB. Tetapi hal tersebut tidak menghalangi Amerika Serikat untuk melancarkan serangannya ke Irak. Operasi militer ini kemudian menjadi perdebatan panjang oleh negara-negara anggota PBB. PBB sebagai badan dunia yang seharusnya mampu menjadi wadah penyelesaian konflik yang efektif bagi anggotanya dianggap tidak mampu untuk menangani permasalahan ini. Sehingga posisi PBB dipandang semakin melemah dimata para anggotanya.

Annan sebagai Sekretaris Jenderal PBB menyikapi isu tersebut dengan mengajukan rencana-rencana reformasinya dalam pidato pembuka di depan Majelis Umum Selasa 23 September 2004. Menurut Annan sangat penting bahwa PBB memiliki peran dan mandat yang jelas. Annan menuntut supaya negara-negara besar selain lima anggota tetap dewan keamanan, yaitu Amerika, Inggris, Perancis, Rusia dan Cina diberi pengaruh lebih besar Karena bila tidak PBB terancam tidak mempunyai arti lagi.³

Kanselir Gerhard Schröder menuntut kenggotaan tetap bagi Jerman dalam Dewan Keamanan PBB. Demikian dikemukakannya dalam upacara pembukaan Akademi Politik Keamanan di Berlin. Dewan Keamanan PBB harus

³ Reinout van Wageningen, terj: Yunita Rovroy/Joss Wibisono, *PBB Harus Direformasi Drastis*,
2002, http://www.un.org/News/Press/docs/2002/02021010reformasi_pbb.html

mewakili semua bangsa dan kawasan di bumi ini.⁴ Tuntutan kanselir Jerman, Gerhard Schröder, untuk menjadi anggota tetap dengan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Agar Jerman juga mendapat hak veto, kanselir Schröder terutama berusaha untuk menciptakan kondisi yang kondusif, di kelompok negara yang mencalonkan diri menjadi anggota tetap.⁵

Pada sesi ke 58 Majelis Umum PBB, Kanselir Federal Jerman Schroeder mengatakan:

"Saya setuju dengan pandangan Sekjen bahwa legitimasi Dewan Keamanan tergantung pada seberapa jauh badan ini bisa merepresentasikan semua bangsa dan kawasan. Dewan harus direformasi dan diperluas termasuk juga perwakilan-perwakilan negara-negara berkembang. Untuk Jerman biar saya ulangi bahwa dalam konteks dari berbagai reformasi kami telah siap untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar".⁶

Pernyataan yang disampaikan Duta Besar Jerman Pleuger pada Majelis Umum PBB pada Dewan Keamanan dan reformasinya, pada 12 Oktober 2004:

"Therefore, countries who are willing and able to make a particularly meaningful contribution to maintaining world peace should become permanent members. This applies to major resource providers among the developed countries as well as to major players in the developing world. For these reasons, we have decided to take on the responsibility associated with a permanent seat and we support the readiness of Brazil, India and Japan to do the same. Again I would like to stress that we consider it particularly important that Africa, as well, will be adequately represented among the new permanent members."⁷

⁴ Jerman menghendaki status anggota tetap dalam Dewan Keamanan PBB, <http://www.dwelle.de/indonesia/nachrichten>

⁵ Jerman tuntut kursi tetap di Dewan Keamanan, <http://www2.dw-world.de/indonesia/presse/1.114643.1.html>

⁶ Reform of the United Nations Security Council - Germany's views, http://www.auswaertiges-amt.de/www/en/aussenpolitik/vn/vereinte_nationen/reform/dt-reform.html

⁷ Statement of Ambassador Pleuger at the General Assembly on the Security Council and its Reform, www.germany-info.org/UN/archive/speeches

Dengan begitu terbukanya kesempatan untuk menjadi anggota tetap DK-PBB membuat Jerman menyatakan keinginannya yang begitu besar pada posisi tersebut. Sehubungan dengan terus bertambahnya kontribusi Jerman dalam upaya mempertahankan perdamaian di seluruh dunia. Mengingat bahwa Jerman merupakan negara yang besar dan memiliki andil yang cukup besar di dunia internasional. Ditambah lagi beberapa faktor yang dapat dijadikan bahan pertimbangan proposal yang diajukan Jerman untuk posisi tersebut.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik sebuah rumusan permasalahan: Mengapa Jerman berkeinginan untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa?

E. Kerangka Dasar Teori

Kata teori berasal dari kata Yunani yang berarti “melihat” atau “memperhatikan”.⁸ Dari pengertian ini bisa dikatakan secara gampang bahwa teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Jadi berteori adalah “pekerjaan menonton” ; yaitu pekerjaan yang mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa terjadi dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu dimasa depan.⁹ Selain itu teori secara dinamis menuntun kita untuk mencari sekumpulan faktor-faktor yang menentukan tentang terjadinya

⁸ T.A. Coulombus dan J.H. Wolfe, *Introduction to International Relations* (Prentice-Hal, 1986), hal. 29

fenomena itu. Maka melihat permasalahan yang ada, penulis berusaha jawaban dengan menggunakan :

Teori Pengambilan Keputusan (Decision Making Theory)

Coplin menekankan bahwa yang menjadi pusat perhatian adalah orang-orang yang memegang peran dalam pengambilan keputusan politik luar negeri, yaitu orang yang memiliki tanggung jawab resmi dan pengaruh aktual dalam mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut keterlibatan negaranya dalam hubungan dengan aktor lain. Pengambilan suatu tindakan luar negeri sebenarnya lebih merupakan suatu proses yang melibatkan banyak pertimbangan dan sangat kompleks.

Bagi Coplin model pengambilan keputusan yang rasional memiliki empat langkah yang saling berkaitan yaitu pendefinisian situasi, seleksi tujuan, mencari alternatif, dan memilih diantara alternatif tersebut. Walaupun begitu, Coplin menyadari adanya kesulitan intelektual yang inheren dalam proses rasional ini, yaitu: (1) pendefinisian situasi yang ada dalam lingkungan internasional Sangat sulit karena sejumlah besar informasi bersifat kompleks dan membawa ketidakpastian, (2) tujuan umum politik luar negeri secara umum sebenarnya agak kabur sehingga sulit membuat rangking tujuan dan mendefinisikan keberhasilan, (3) ketidakpastian lingkungan internasional dan kekaburan tujuan kongkrit politik luar negeri cenderung menciptakan kebijakan yang tidak terbatas yang hanya sebagian saja yang dapat diramalkan, (4) seleksi alternatif kebijakan dengan

Para aktor pembuat keputusan dan kebijakan politik luar negeri status bangsa pasti akan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap formulasi kebijakan luar negerinya, seperti yang dikemukakan oleh William D. Coplin sebagai berikut:

To be interested in why state behave as they do interest area, we have to be interested in why their leader take the decision. However, it would be mistaken to think that foreign policy maker act in vacuum. On the contrary, any given foreign polity act maybe viewed as the result of three board categories of considerations affecting the foreign policy decision makers. The first domestic poiltics within the foreign policy decision maker state. The second is the economy and military capability of the state. The third is the international context the particular position in which his state finds it self specially in relation to other state in system. (William D. Coplin, 1992:30)

Menurut Coplin, tindakan politik luar negeri tertentu mungkin bisa dipandang sebagai aksi dari 3 konsiderasi atau faktor-faktor yang mempengaruhi para pengambil keputusan dalam kebijakan luar negeri statu negara, yaitu:¹⁰

- Kondisi politik dalam negeri yang meliputi keadaan atau situasi di dalam negara yang akan membuat keputusan, yaitu situasi politik didalam negara itu yang berkaitan dengan keputusan tersebut, termasuk didalamnya faktor budaya yang mendasari tingkah laku manusianya.
- Kemampuan ekonomi dan militer, yaitu situasi ekonomi dan militer di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan.

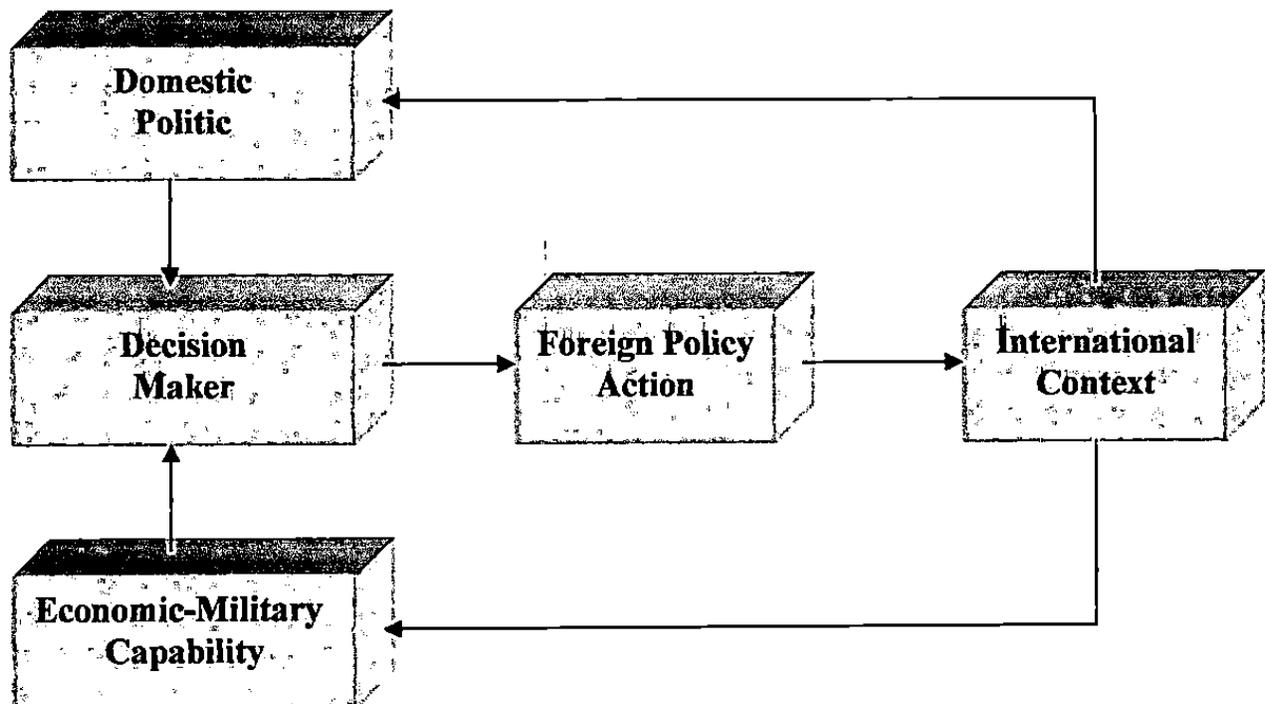
¹⁰ William D. Coplin, *Introduction to International Politics, A Theoretical Overview* (terjemahan M. Marbun), Bandung, CV. Sinar Baru, 1992, hal. 30

- Konteks internasional yaitu status produk tindakan politik luar negeri seluruh negara pada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang, yang mungkin diantisipasi. Dengan kata lain, menyangkut situasi di negara yang sedang menjadi tujuan politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui ilustrasi bagan di bawah ini yang akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan luar negeri suatu negara:

Gambar 1

**Proses Pengambilan Keputusan Luar Negeri
(Decision Making Theory) oleh William D. Coplin**



Berdasarkan teori diatas, dapat kita ketahui bahwa keinginan Jerman untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa dipengaruhi oleh faktor-faktor :

1. Kondisi Ekonomi dan Militer

Republik Federal Jerman secara geografi dan geopolitik terletak di jantung Uni Eropa, sebagai negara terbesar di kawasan Eropa baik populasi maupun luas wilayah. Jerman merupakan negara kuat dan memiliki pengaruh ekonomi, urutan teratas di Eropa dan ketiga di dunia. Dengan Gross Domestic Product (GDP) 3 miliar Deutsche Mark kurang dari sepertiga GDP Amerika dan setengah Jepang. Selain itu juga merupakan salah satu dari delapan negara industri barat atau dikenal dengan G8. Sebagai salah satu kandidat untuk keanggotaan permanen Dewan Keamanan PBB, Jerman telah menjadi kontributor terbesar ketiga terbesar setelah Amerika dan Jepang. Kontribusi yang diberikan bahkan lebih besar dibandingkan dengan anggota Dewan Keamanan Tetap PBB yang lainnya seperti Inggris, Perancis dan Cina. Yang masing-masing berada pada posisi keempat, kelima dan ketujuh. Yaitu dengan memberikan dana sebesar 10% terhadap anggaran PBB pada tahun 2001. Dalam segi kekuatan militer Jerman memiliki sekitar 7.800 tentara yang ditugaskan kedalam misi Internasional. Bekerjasama dengan negara-negara lain dibawah koordinasi PBB dan NATO menegakkan keadilan, melawan terorisme dan menegakkan demokrasi. Berdasarkan komitmen pada kerjasama internasional, Jerman termasuk salah satu kontributor

terbesar tentara pada misi-misi multinasional setelah Amerika. Kekuatan militer Jerman telah ditugaskan pada misi-misi perdamaian PBB seperti di Afghanistan, Semenanjung Afrika, Uzbekistan, Kosovo, Bosnia-Herzegovina dan Georgia.¹¹ Saat ini Jerman mendapat tugas langsung pengiriman tentara dan polisi dalam delapan misi PBB. UNAMA dan ISAF untuk Afghanistan, UNMEE untuk Ethiopia and Eritrea, UNMIK dan KFOR untuk Kosovo, UNOMIG untuk Georgia, UNAMSIL untuk Sierra Leone dan SFOR untuk Bosnia-Herzegovina. Menyediakan perawatan medis pada misi UNAMA sebagaimana dukungan teknis dan logistik dalam UNAMSIL. Mengambil alih tugas administratif dan peradilan dimisi UNTAET dan UNMIK. Serta dukungan teknis dalam MONUC untuk Republik Demokrasi Kongo.¹²

2. Konteks Internasional

Sejarah kelahiran PBB telah mencatat bahwa pembentuk organisasi ini dimasukkan kedalam negara-negara besar pemenang Perang Dunia II. Negara-negara besar yang notabene sebagai negara sponsor dipercayakan untuk memiliki hak istimewa berupa suara yang biasa dikenal dengan hak veto. Seiring perjalanan PBB dalam politik internasional negara-negara merdeka semakin bertambah dengan program dekolonisasi PBB. Masuknya negara-negara baru ini merubah peta politik internasional dimana mereka menjadi kekuatan-kekuatan

baru yang patut diperhitungkan. Beberapa dari mereka menunjukkan kekuatan dibidang ekonomi yang begitu pesat seperti Jerman dan Jepang. Dengan perubahan ini hak veto dari Dewan Keamanan PBB pun mulai dipertanyakan. Hal ini dianggap sebagai penghambat demokratisasi PBB. Kemampuan veto yang dimiliki oleh anggota Dewan permanen dapat dengan mudah mematahkan segala macam keputusan yang diambil dalam PBB. Hal inilah yang menyadarkan masyarakat internasional menuntut perubahan dalam tubuh PBB dengan memperluas jumlah anggota tetap Dewan Keamanan, sehingga menjadi lebih demokratis dan representatif. Jerman merupakan salah satu negara yang mendukung perlunya reformasi dan restrukturisasi PBB. Dan dalam upayanya tersebut Jerman telah memperoleh banyak dukungan dari beberapa negara. Dukungan ini mengalir dari empat anggota tetap Dewan Keamanan PBB seperti Perancis, Inggris, Rusia, dan Cina walau tak terikat. Selain itu juga dukungan lahir dari negara-negara yang menginginkan posisi yang sama yaitu keanggotaan tetap dalam Dewan Keamanan PBB seperti Jepang, India, dan Brasil. Serta dukungan dari mayoritas anggota Uni Eropa sebanyak 15 negara dan Asia seperti Malaysia dan Tiongkok. Ditambah lagi dengan adanya wacana reformasi ditubuh PBB atas desakan dari negara-negara anggotanya. Apalagi melihat adanya rencana reformasi Dewan Keamanan PBB, seperti diusulkan oleh komisi reformasi yang dibentuk sekjen PBB Koffi Annan, dengan merencanakan perluasan dengan sedikitnya tiga negara

tambahan berstatus tetap.¹³ Semakin menguatkan keinginan Jerman untuk meraih posisi kursi permanen tersebut.

F. Hipotesa

Dari permasalahan yang ada dan kerangka pikiran yang telah ditetapkan, maka penulis memulai penelitian ini dari hipotesa:

Keinginan Jerman untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa lebih disebabkan oleh kemampuan ekonomi dan militer serta perubahan konteks internasional.

G. Jangkauan Penulisan

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis memberi batasan waktu antara awal tahun 2002 sampai dengan 2005 sehingga nantinya penulisan ini tidak meluas dan lebih terfokus. Namun tidak tertutup kemungkinan untuk mengutip kejadian-kejadian ataupun kasus dan juga berita yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, selama itu masih relevan dan berhubungan dengan penulisan ini.

H. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan berbagai macam studi kepustakaan (*library research*). Pemanfaatan data-data didapatkan dari literatur-literatur, baik itu buku-buku teks, jurnal ilmiah, artikel-artikel, majalah, koran dan juga melalui internet.

¹³ Jerman menuntut kursi tetap di Dewan Keamanan,
<http://www2.dw-world.de/indonesia/presse/1.114643.1.html>

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana pembahasan dalam masing-masing bab akan dijelaskan dan dijabarkan secara lebih rinci ke dalam sub-sub bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan bab-bab lainnya saling berhubungan erat satu sama lainnya, sehingga pada akhirnya nanti membentuk karya tulis yang runtut dan sistematis.

Adapun sistematika penulisan itu sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Berisikan langkah-langkah pembuatan skripsi sebagai pedoman langkah berikutnya. Langkah-langkah tersebut tersusun sebagai berikut :

Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Jangkauan Penulisan, Teknik Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Jerman Dalam Politik Internasional.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai sejarah terbentuknya Jerman dan tiga fase penting perjalanan politik Jerman serta perilaku Jerman didalam organisasi internasional.

Bab III. PBB dan Isu Reformasi.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum PBB beserta struktur organisasinya. Serta penjelasan mengenai isu reformasi PBB dan posisi Jerman dalam reformasi tersebut.

Bab IV. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keinginan Jerman.

Berisi tentang analisa penulis berdasarkan teori yang digunakan yaitu tentang upaya dari keinginan Jerman untuk memperoleh posisi sebagai Dewan Keamanan Tetap Perserikatan Bangsa Bangsa. Yaitu faktor pertimbangan internal dan eksternal yang mendukung keinginan Jerman.

Bab V. Kesimpulan

Ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi, isinya berupa kesimpulan dari bahasan-bahasan sebelumnya yang merupakan rangkuman kembali dari pokok-pokok bahasan yang telah